

**PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Wahyu Soni Hendrawan

C100.050.167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan termasuk orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dalam hal ini berarti dalam penegakan hukum di Indonesia setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan harus diperhatikan hak-haknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan antara lain meliputi polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa, saksi dan korban.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindak pidana yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat atau superior di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.

Pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang tidak mampu secara ekonomi saja yang melakukan tindak pidana sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang yang berkecukupan dalam segi ekonomi. Bagi orang yang berkecukupan dalam segi ekonomi biasanya kejahatan dilakukan tergolong kejahatan yang besar yang bukan

sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup semata. Sementara itu korban tindak pidana merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kriminalitas. Seseorang dikatakan sebagai korban tindak pidana adalah mereka yang mengalami kerugian baik rohani maupun jasmani. Korban kejahatan tak jarang tidak hanya mengalami kehilangan harta benda tetapi, terkadang mereka juga terganggu secara mental akibat suatu tindak pidana atau kejahatan yang mereka alami.

Terjadinya suatu tindak pidana dengan sendirinya akan menimbulkan akibat negatif pada setiap korbannya, baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian yang dialami korban secara materiil adalah kerugian karena hilangnya harta benda karena dicuri. Sementara itu kerugian immaterial adalah kerugian karena menjadi korban tindak pidana yang dapat mengakibatkan tekanan mental bagi korban.

Berbicara mengenai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian immaterial salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM berat, dalam tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai jenis perbudakan era modern dan konsep dasarnya pada perekrutan dengan cara memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu Negara ataupun ke Negara lain dan korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dijual, dibeli dan diperjualbelikan kembali serta dirampas hak asasinya yang dapat beresiko menyebabkan kematian bagi korbannya.

Di Indonesia, korban-korban perdagangan orang sering kali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual seperti pelacuran, serta dipekerjakan pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti bekerja di perkebunan, pembantu rumah tangga, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak dan pengemis jalanan serta pengamen jalanan. Korban perdagangan orang biasanya anak dan wanita berusia muda yang belum menikah. Korban wanita sering kali berasal dari golongan masyarakat menengah kebawah yang diharapkan dapat menambah penghasilan bagi keluarga, sedangkan korban anak biasanya berasal dari penculikan anak. Selain itu, korban perdagangan orang juga berasal dari orang miskin, orang yang berhutang, anak tiri dan sebagainya.

Pelaku perdagangan orang biasanya merekrut korbannya melalui iklan berkedok pengiriman TKI, perkenalan biasa dan sebagainya. Pelaku dalam menjalankan aksinya memberi janji manis kepada korban seperti dijanjikan pekerjaan yang layak dan bergaji tinggi tetapi ketika sampai di tempat tujuan mereka dijual/dijebak dan dipaksa bekerja tanpa bayaran atau sedikit bayaran serta melakukan segala sesuatu yang dikehendaki pelaku dengan ancaman kekerasan bahkan ancaman pembunuhan. Beberapa dari mereka bahkan dipaksa bekerja di bawah sekapan termasuk eksplotasi seksual.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan banyak mendapat putusan Hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi penangkal terhadap merebaknya tindak pidana perdagangan orang, akan

tetapi dalam kenyataannya dalam melakukan penegakan hukum aparat penegak hukum termasuk hakim dalam menjatuhkan putusan hanya memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana saja dan kurang memperhatikan korban.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut porposi yang sebenarnya secara dimensional, mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan.¹ Korban mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam terjadinya suatu kejahatan, karena kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, korban merupakan unsur penting dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh penjahat dimana dalam hal pemenuhan kepentingan penjahat dapat berakibat penderitaan bagi korban. Dengan demikian dapat dikatakan si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Akibat yang terjadi pada korban karena adanya tindak pidana maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban penegakan hukum lebih memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa tetapi kurang memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan hukum pidana

¹ Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal 43

positif di Indonesia dimana banyak peraturan yang lebih mengatur hak pelaku, tersangka, atau terdakwa tetapi sangat minim peraturan yang mengatur hak korban. Dengan demikian diharapkan dengan dikeluarkannya undang-undang ini dapat melindungi korban tidak hanya dalam proses mencari keadilan tetapi juga mengembalikan kepercayaan diri korban.

Pada masa lalu pengaturan hak-hak tersangka /terdakwa banyak diatur secara lengkap, khusus diatur dalam bab VI dan VII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi hak-hak korban kurang mendapat pengaturan secara khusus tetapi tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP sangat memperhatikan hak-hak seseorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di persidangan, penjatuhan hukuman sampai pasca persidangan, yaitu pelaksanaan putusan. Karenanya, tidak mengherankan jika KUHAP dinilai sangat lekat terhadap hak asasi manusia (HAM). Pengemasan hak-hak seseorang yang tersangkut tindak pidana, ternyata tidak diimbangi pengemasan hak-hak korban kejahatan. Seperti kita ketahui, antara pelaku dan korban kejahatan sama-sama merupakan pencari keadilan.

Dalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, hak-hak korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengacu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam proses peradilan telah melindungi hak-hak korban perdagangan orang atau belum, karena pada

kenyataanya dalam penanganan perkara di pengadilan hakim lebih condong memperhatikan kepentingan dan hak-hak pelaku saja.

“Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah”.² Dengan demikian dalam hal ini hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya perlu ditegakkan dan mendapatkan perlindungan termasuk dalam proses peradilan.

Dengan melihat pada uraian di atas, maka oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan di atas dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak terlalu dan menyimpang dari pokok permasalahan maka Skripsi ini difokuskan pada perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam ruang lingkup hukum pidana positif Indonesia. Perlindungan ini difokuskan dalam hal hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

² Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal 129

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan difokuskan pada ruang lingkup pidana tidak mencakup ruang lingkup militer atau yang lain.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana?
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah untuk :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan peradilan pidana.

Sementara itu, selain tujuan penelitian seperti yang tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek di lapangan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang lebih mendalam, khususnya mengenai penegakan hukum hak-hak korban perdagangan orang dalam proses peradilan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

D. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum maka Negara wajib menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya serta mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan termasuk tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang.

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, dengan demikian dampak positif dan negatifnya

terletak faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri; 2) Faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan.³ Dalam penegakan hukum pada hakikatnya mengandung tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 1) kepastian hukum; 2) kemanfaatan dan 3) keadilan.⁴

Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merambah dalam dunia hukum khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang sebagai puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. “Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.⁵

Teori ini disebut teori pembalasan atau penebusan, yang artinya bahwa korban melakukan pembalasan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau kejahatan melalui jalur hukum. Cara ini selama ini dianggap efektif oleh aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan, akan tetapi aparat penegak hukum kurang memperhatikan keadaan sebenarnya dari korban. Seiring dengan berjalannya waktu dan

³ Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. Hal 10

⁴ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 134

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 9

perkembangan jaman teori pembalasan dirasakan kurang memberikan kepuasan dalam mencapai keadilan oleh korban kejahatan.

Selama ini aparat penegak hukum hanya melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap telah melakukan keadilan bagi korban. Akan tetapi pada kenyataannya dalam melakukan penegakan hukum aparat penegak hukum kurang memperhatikan rasa sakit yang dialami korban kejahatan meskipun telah dibalaskannya rasa sakit pada pelaku bukan berarti penderitaan korban dapat pulih seperti sedia kala. Hal ini akan membuat pandangan yang semula hanya memperhatikan pelaku tindak pidana dapat berubah arah.

Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.⁶ Dengan demikian, paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana.

“Menurut J. Andeneses teori relatif dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the teori of social defence*). Teori relatif atau teori restoratif ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari

⁶ Howard Zehr. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse. Hal 18.

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat”.⁷

Dalam teori restoratif dikenal dengan keadilan restoratif yang merupakan suatu produk peradilan yang berorientasi pada upaya-upaya perbaikan atau pemulihan dalam menangani dampak-dampak kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa pemikiran dalam peradilan dan keadilan restoratif berupaya untuk melakukan suatu usaha perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dan hak-hak korban kejahatan tidak semata-mata untuk menghargai hak asasi dari korban dalam proses peradilan pidana tetapi juga berusaha berusaha untuk memperbaiki atau memulihkan dampak kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional serta kerugian secara materiil dan immaterial.

“Pada tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September 1985 di Milan di selenggarakan United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ke-VII yang temanya adalah pencegahan kejahatan untuk kebebasan, keadilan, kedamaian dan pembangunan. Salah satu topik yang dibahas secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Pada kesempatan tersebut dihasilkan sebuah draft Deklarasi. Yang di dalamnya memuat rekomendasi agar korban diberikan hak *to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceedings*. Rekomendasi semacam ini juga terdapat pada *U.S. Presidential Task Force on Victims of Crime (USA, 1983)*. Saat ini banyak negara bagian di Amerika Serikat yang sudah mengatur tentang *victim opinion statement* yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahan guna penjatuhan pidana bagi si pelaku. Demikian pula di Eropa.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Hal. 14

Republik Federal Jerman misalnya, pengaturan tersebut dinamakan *Mebenklage*".⁸

Dalam tindak pidana perdagangan orang perlindungan terhadap korban dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang dijelaskan hak-hak korban perdagangan orang antara lain : 1) Korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas; 2) Korban tindak pidana perdagangan orang beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara oleh Kepolisian Republik Indonesia; 3) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi; 4) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang; 5) Korban berhak mendapat perlindungan baik di dalam maupun di luar negeri; 6) Korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam undang-undang ini.

Dalam proses peradilan pidana, para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasihat hukum, serta hakim dengan didukung alat bukti

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1982. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Semarang: Alumni. Bandung. Hal. 85

yang ada, cenderung lebih memperhatikan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya tercapai karena dianggap kurang memenuhi hak-hak korban.

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban Hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang menguntungkan pihak korban, hal ini disebabkan karena Hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku kurang memperhatikan hak-hak para korban tindak pidana atau kejahatan.

Apabila dijabarkan berarti kedudukan korban sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, korban kejahatan dalam peradilan pidana harus diberi perlindungan hukum termasuk penegakan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengaturan yang

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami”.⁹

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif yakni mengkaji aturan-aturan tentang penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana dengan melakukan inventarisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Namun demikian, untuk mendukung dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian penelitian ini juga melakukan pendekatan secara empiris, dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan aturan-aturan tentang penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

2. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.¹⁰ Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986. Hal 67

¹⁰ *Ibid.* Hal 13

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Sragen pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang dan ketertarikan penulis meneliti penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan orang yang selama ini banyak mengalami kendala dalam proses peradilan pidana.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berasal dari sumber data yang berbentuk peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, dan hubungan-hubungan hukum dari pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer meliputi :

- a) KUHP
- b) KUHPA
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e) Peraturan Dasar Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR

f) Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban.

2) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data untuk menganalisis data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh melalui dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan-undangan, hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan tetapi bahannya terfokus dengan permasalahan yang diteliti penulis.

b. Wawancara

Pengumpulan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam yang bersumber dari aparat penegak hukum yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Sragen.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif terdiri dari tiga cara

pengumpulan data : (1) wawancara mendalam, wawancara dengan format terbuka; (2) observasi langsung; dan (3) pemanfaatan dokumen tertulis.¹¹

Analisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan akan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: Pada tahap awal akan dilakukan wawancara terhadap narasumber yang dilakukan secara urut dan terperinci dengan maksud agar diperoleh suatu gambaran tentang apa yang tercakup dalam permasalahan mengenai arti penting penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana.

Tahap selanjutnya adalah akan dilakukan studi kepustakaan, dengan cara mencari dan menginventarisir berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan atas berbagai data dengan kenyataan empiris yang terjadi di lapangan dengan cara membandingkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan normatifnya yang kemudian disusun secara sistematis.

F. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana setiap Bab terdiri dari sub-sub bab yang dimaksudkan

¹¹ Michael Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 1.

untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan dari hasil penelitian ini, adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Pendahuluan berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari : latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi : tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang korban kejahatan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perdagangan orang, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, upaya pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran sebagai bagian penutup.